

**KARAKTERISTIK DESA MIGRAN PRODUKTIF YANG MEMPENGARUHI  
BANYAKNYA TKI BEKERJA KE LUAR NEGERI**

Suryadi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan

*Suryadi.value@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The decrease of Indonesian Migrant Workers (TKI) working abroad, brings its own problems. One of the problems faced is the emergence of new unemployment as a result of the lack of existing jobs. For that, the government seeks to create new jobs in the country through the formation of Desmigratif. This research aims to determine the effect of productive migrant village characteristics on the number of migrant workers who work abroad.*

*The influence of each independent variable such as variable of  $X_6$  (existence of cooperative), variable of  $X_{13}$  (number of types of economic means in the village), variable of  $X_{15}$  (population of productive age) and variable of  $X_{18}$  (territorial, Java and outside Java) to the dependent variable Y (the number of migrant workers working abroad).*

*Resources, facilities and infrastructure of economic activities in productive migrant villages are very heterogeneous. The village government must have seriousness in making development policy to support community empowerment program, so that people will stay in the village, get a job or economic business, have income and prosperous, so do not leave their village to work abroad become TKI. All stakeholders in this program need to cooperate in identifying problems, mapping the potential of natural resources, people, culture, and village economics to become capital for development of productive migrant village.*

*Keywords: Independent Variable, Dependent Variable, Indonesian Worker, Desmigratif*

**ABSTRAK**

Penurunan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri, membawa masalah tersendiri. Salah satu masalah yang dihadapi yakni timbulnya pengangguran baru sebagai akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang ada. Untuk itu, pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri melalui pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik desa migran produktif terhadap banyaknya TKI yang bekerja ke luar negeri.

Pengaruh masing-masing variabel bebas seperti variabel  $X_6$  (keberadaan koperasi), variabel  $X_{13}$  (banyaknya jenis sarana ekonomi yang ada di desa), variabel  $X_{15}$  (banyaknya penduduk usia produktif) dan variabel  $X_{18}$  (kewilayahan, Jawa dan luar Jawa) berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel terikat Y (banyaknya TKI bekerja ke luar negeri).

Sumberdaya, sarana dan prasarana kegiatan ekonomi pada desa migran produktif sangat heterogen. Pemerintah desa harus memiliki keseriusan dalam membuat kebijakan pembangunan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat betah tinggal di desa, mendapat pekerjaan atau usaha ekonomi, memiliki pendapatan dan sejahtera, sehingga tidak meninggalkan desanya untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKI. Semua stakeholder dalam program ini perlu bekerjasama dalam melakukan identifikasi masalah, pemetaan potensi sumber daya alam, manusia, budaya, dan ekonomi desa untuk dijadikan modal bagi pembangunan desa migran produktif.

Kata Kunci : Variabel Bebas, Variabel Terikat, Tenaga Kerja Indonesia, Desmigratif

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain karena manusialah yang menggerakkan semua sumber daya seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Berdasarkan data Sakernas Februari 2017, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja mencapai 131,55 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 3,88 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 yang mencapai 127,67 juta orang. Kenaikan jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2016-Februari 2017 seiring dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu dari 68,06 persen pada Februari 2016 menjadi 69,02 persen pada Februari 2017.

Secara nasional angka *Employment to Population Ratio* (EPR) pada Februari 2017 adalah sebesar 65,34. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada Februari 2017 dari sebanyak 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja. EPR Februari 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,03 poin jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2016. EPR merupakan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Meningkatnya jumlah angkatan kerja dapat menimbulkan masalah kesempatan kerja, hal ini berkaitan dengan aspek ekonomi maupun non ekonomi. Kondisi demikian, mengindikasikan semakin mendesaknya keputusan perluasan kesempatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja akan menampung semua

tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Kesempatan kerja, dengan kata lain juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2017 mencapai 5,33 persen yang mengandung makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 5 orang yang masuk kategori penganggur. Pengangguran yang masih tergolong tinggi ini terjadi karena perluasan kesempatan kerja yang ada berjalan lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja. Sebagai konsekuensi akhir, dengan masih banyaknya jumlah pengangguran, hal ini tentunya akan mempengaruhi pula pada peningkatan perekonomian.

Migrasi terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan terbukanya peluang kerja, sehingga menyebabkan banyaknya angkatan kerja produktif yang menganggur (*unemployment*). Faktor ekonomi dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi. Dalam kaitannya dengan migrasi internasional, kondisi demikian terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar negara. Fenomena migrasi adalah keinginan individu dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Migrasi berpengaruh terhadap tingkat upah pada wilayah negara pengirim dan negara penerima dalam jangka waktu yang singkat hingga menengah. Migran yang mengirimkan uangnya (*remittance*) ke negara asal akan mempengaruhi perekonomian di negara asalnya dan juga rumah tangga pekerja migran.

Mengalirnya arus remitansi, berdampak pada penguatan ekonomi keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri. Penguatan ekonomi keluarga TKI dapat menjadi basis dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dan juga mampu menggerakkan ekonomi keluarga TKI. Masuknya dana remitansi tersebut akan memberi *multiplier effect* terhadap penguatan jaring pengaman sosial yang penting dalam membangun interaksi program asuransi sosial, kesehatan, pendidikan, jasa keuangan, penyediaan sarana dan prasarana desa. Salah

satu masalah terkait dengan penempatan TKI yakni masih banyak TKI yang bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar (ilegal), sehingga menimbulkan permasalahan yang antara lain gaji tidak dibayar, pelecehan seksual, bahkan ada yang terkena kasus hukum. Dalam hal TKI ilegal ini, pemerintah masih belum banyak memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan calon TKI ataupun TKI dan anggota keluarganya, Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara. Sasaran Desmigratif adalah 120 (seratus dua puluh) desa yang terbanyak mengirimkan TKI. Data tersebut di dapat dari data Potensi desa yang bersumber dari BPS tahun 2014. Dalam menjalankan program Desmigratif, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sinergi dengan tujuh kementerian yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Ruang lingkup kerja sama antar kementerian tersebut antara lain meliputi:

- 1) Membangun Pusat Layanan Migrasi, sehingga orang atau warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain berupa informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri serta pengurusan dokumen awal.
- 2) Memupuk Usaha Produktif dengan tujuan untuk membantu pasangan TKI yang bekerja ke luar negeri agar memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Kegiatan ini mencakup pelatihan dan pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif hingga pemasarannya.
- 3) *Community Parenting*, yaitu kegiatan untuk menangani anak-anak TKI atau anak-anak pekerja migran. Anak yang ditinggalkan akan diasuh bersama-sama

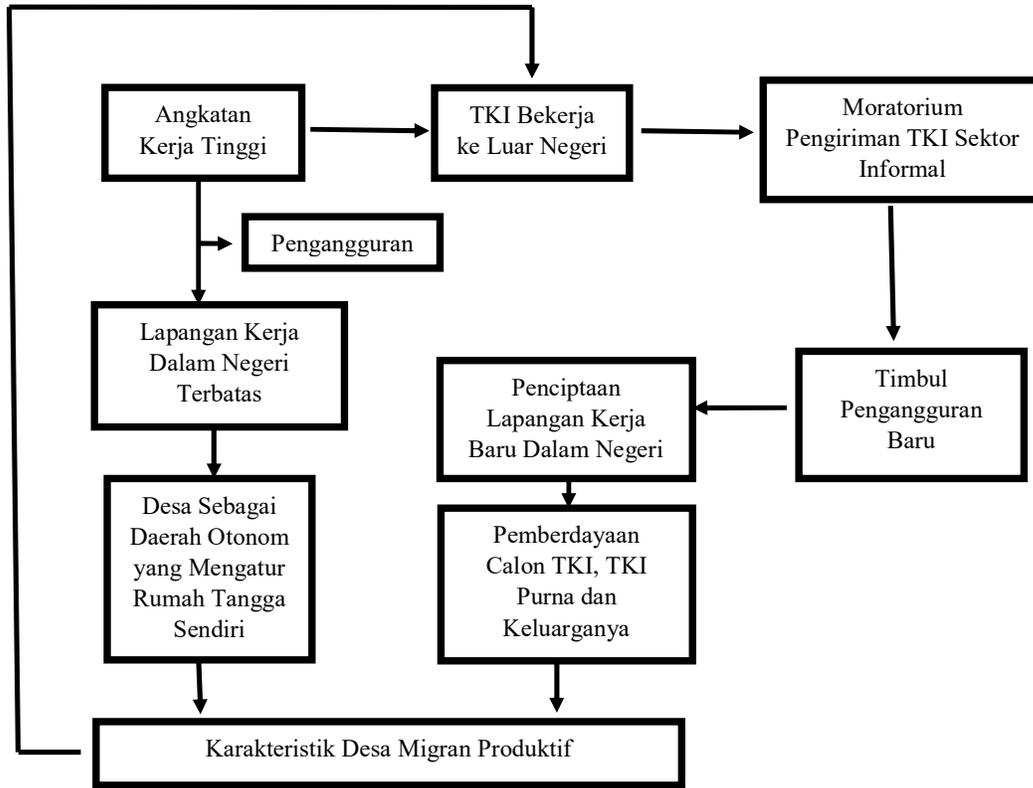
oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar. Dalam konteks ini, orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak secara baik. Tujuannya adalah agar mereka bisa terus bersekolah mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan masa kanak-kanaknya.

- 4) Membentuk Koperasi Desmigratif untuk penguatan usaha produktif jangka panjang. Koperasi usaha produktif ini juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang didukung oleh pemerintah.

Sejak tahun 2014-2016, jumlah TKI yang diberangkatkan secara resmi ke luar negeri kian menurun, terutama sejak diberlakukannya moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah. Pada tahun 2014, jumlah TKI yang diberangkatkan sebesar 429.872 orang, pada tahun 2015 sebanyak 275.736 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 244.451 orang. Perhatian global terhadap persoalan pekerja migran sangat serius dan semakin diperhitungkan menjadi variabel dari gerak ekonomi dunia. Hal ini seiring dengan masuknya masalah pekerja migran dalam agenda baru dan tujuan yang ada di *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati menjadi *platform* global bagi seluruh negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### Masalah Penelitian

Penurunan TKI yang bekerja ke luar negeri tentunya akan membawa masalah tersendiri. Salah satu masalah yang dihadapi adalah timbulnya pengangguran baru (Gambar 1) sebagai akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang ada. Untuk itu pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri, yang salah satunya melalui pembentukan Desmigratif. Proses pembentukan Desmigratif diawali dengan adanya identifikasi dan pemetaan potensi desa yang menjadi kantong TKI. Proses pemetaan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan institusi lainnya serta bersama dengan aparat desa setempat. Desmigratif akan memberikan beberapa program pemberdayaan keluarga TKI, dari pelatihan dan pemberdayaan potensi desa, produksi, hingga distribusi dan pemasaran produk desa.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

Pembangunan desa menjadi penentu keberhasilan bagi pembangunan daerah dan nasional karena desa memiliki sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya, seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, jasa dan pariwisata. Pembangunan desa menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini akan memberikan kesempatan lebih terbuka bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan bersama pemerintah desa. Namun pada kenyataannya, pemerintah desa belum mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan potensi desa serta mengubah orientasi masyarakat desa untuk menjadi pekerja migran. Masyarakat tetap saja meninggalkan desa dengan segala potensinya untuk mencari pekerjaan dan kesejahteraan ke luar negeri sebagai pekerja migran atau TKI.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik desa migran produktif terhadap banyaknya TKI yang bekerja ke luar negeri.

**Hipotesis Penelitian**

H<sub>0</sub> : Karakteristik desa tidak berpengaruh terhadap banyaknya TKI bekerja ke luar negeri

H<sub>1</sub> : Karakteristik desa berpengaruh terhadap banyaknya TKI bekerja ke luar negeri

**TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk menelaah pembangunan desa, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Haeruman (1997) menyebutkan, ada dua sudut pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

- 1) Pembangunan pedesaan dapat dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan adanya campur tangan dari pihak luar sehingga perubahan yang diharapkan dapat berlangsung dalam jangkauan waktu yang panjang;

- 2) Pada sisi lain, pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu interaksi antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Sasaran pokok pembangunan pedesaan yang ingin dicapai menurut Haeruman (1997) yakni terciptanya kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan yang kokoh serta mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut, diupayakan secara bertahap dengan langkah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas tenaga kerja di pedesaan; 2) Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa; 3) Menguatkan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa; 4) Mengembangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; 5) Mengembangkan sarana dan prasarana pedesaan; dan 6) Memantapkan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Pembangunan pedesaan akan semakin menjadi perhatian di masa depan seiring dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka. Namun sampai saat ini desa masih belum beranjak dari profil lamanya, yakni keterbelakangan dan kemiskinan. Berdasarkan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Telah banyak penelitian mengenai migrasi internasional, yang sebagian berpendapat bahwa terjadinya migrasi internasional disebabkan oleh faktor ekonomi, adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antara negara yang lebih maju dibandingkan negara berkembang. Penelitian tentang ekonomi pekerja migran telah mengalami transformasi yang menarik dan signifikan selama beberapa tahun terakhir seperti yang disampaikan oleh Stark dan Bloom (1985). Sebagian besar penelitian terbaru yang lebih menarik dikaitkan dengan pengembangan ekonomi. Situasi tersebut mungkin sebagian disebabkan oleh fakta bahwa dampak perbedaan upah terhadap migrasi cenderung diimbangi oleh program kompensasi pengangguran dan kebijakan fiskal lainnya di

negara maju. Untuk mengatur migrasi internasional, Massey et al. (1993) menyatakan bahwa pembuat kebijakan dapat mengaturnya melalui tingkat upah di negara asalnya serta dengan mempromosikan pembangunan ekonomi di negara asal.

Pembangunan pedesaan merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar (Bappenas dan BPS, 2015). Pembangunan pedesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi kesenjangan kemajuan wilayah, sebagai akibat dari pembangunan ekonomi serta diharapkan menjadi solusi bagi perubahan masyarakat desa serta menjadikan desa sebagai basis perubahan. Sumber pertumbuhan ekonomi diupayakan tertuju ke pedesaan dengan maksud agar desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal serta sebagai tempat mencari kehidupan. Oleh karena itu, infrastruktur di desa seperti sarana pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi dan komunikasi serta sarana lain yang dibutuhkan harus dapat disediakan sehingga memungkinkan desa untuk berkembang dan maju.

Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan oleh Latifah dan Rahadjeng (2016) terhadap Kecamatan Donomulyo, ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari TKI yang sudah pulang, memperlihatkan keberhasilan dalam pengembangan usaha yang terkait dengan potensi desa. Hal ini terjadi karena TKI purna tersebut telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Meskipun sumber daya manusianya memiliki pendidikan dan motivasi yang rendah, akan tetapi dengan adanya dukungan pemerintah setempat, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya modal maka pengembangan usaha di wilayah Kecamatan Donomulyo ini akan berhasil dengan baik.

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam merencanakan maupun melaksanakan program pembangunan pedesaan tersebut, tidak dapat dilakukan secara seragam melainkan harus sesuai dengan ciri khas dari masing-masing

desa. Hal ini disebabkan setiap desa memiliki karakteristiknya masing-masing yang berbeda dilihat dari segi mutu sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), jumlah penduduk, keadaan sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, termasuk masalah dan kebutuhan pokok masyarakat yang berbeda pula.

Menurut Pasaribu (2007), desa sebagai basis potensial bagi kegiatan ekonomi haruslah menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi, menuntut kebijakan yang tepat yang perlu dikembangkan oleh para pembuat kebijakan dalam mengembangkan potensi wilayah pedesaan. Sudah saatnya menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan menjadikan desa sebagai motor utama penggerak roda perekonomian. Pembangunan daerah pedesaan yang berkelanjutan diharapkan dapat menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat setempat. Hal ini akan mendorong para pekerja di pedesaan untuk tetap tinggal dan bekerja di desa mereka. Dalam jangka panjang, pembangunan pedesaan akan lebih menguntungkan bagi perekonomian pedesaan.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan hasil survei Desmigratif tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi sebanyak 120 desa untuk disurvei yang sebagian besar wilayah desa diambil dari hasil survei Potensi Desa (PODES) tahun 2014. Dari 120 desa yang disurvei, hanya 97 desa yang menjadi sampel sesuai dengan tujuan penelitian ini. Data Desmigratif dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi baik dari kepala desa, ketua RT maupun masyarakat yang terkait dengan tujuan dilaksanakannya Program Desmigratif. Pada responden, teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai panduan. Selain itu, wawancara secara mendalam dilakukan juga pada responden-responen tertentu yang memiliki informasi

lebih mengenai pengalamannya yang terkait dengan Desmigratif.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang menyoroti hubungan antarvariabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan didukung oleh data hasil wawancara secara mendalam antara peneliti dan responden. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif dalam penelitian ini terdiri atas data ordinal, data interval dan data rasio. Data ordinal memiliki peringkat atau urutan dan mengandung tingkatan. Data interval mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama. Data rasio merupakan data yang meliputi semua ukuran di atas ditambah dengan satu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain variabel bebas berupa ketersediaan listrik ( $X_1$ ); ketersediaan telepon/*handphone* ( $X_2$ ); ketersediaan internet ( $X_3$ ); ketersediaan ruang layanan informasi bagi TKI ( $X_4$ ); ketersediaan rumah Desmigratif ( $X_5$ ); keberadaan koperasi ( $X_6$ ); keberadaan Badan Usaha Milik Desa ( $X_7$ ); penduduk desa penerima kredit ( $X_8$ ); banyaknya aparatur desa yang lulus di atas SLTA ( $X_9$ ); banyaknya penduduk desa yang lulus di atas SLTA ( $X_{10}$ ); banyaknya penduduk desa yang tidak bersekolah ( $X_{11}$ ); banyaknya penduduk desa yang bersekolah ( $X_{12}$ ); banyaknya jenis sarana ekonomi yang ada di desa ( $X_{13}$ ); banyaknya penduduk desa yang berusia 0–14 tahun ( $X_{14}$ ); banyaknya penduduk usia produktif ( $X_{15}$ ); banyaknya penduduk usia kerja ( $X_{16}$ ); tingkat pengangguran ( $X_{17}$ ); variabel kewilayahan ( $X_{18}$ ) serta variabel terikat berupa jumlah TKI aktif yang bekerja ke luar negeri ( $Y$ ).

Pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda. Oleh karena itu, data yang semula skala ordinal, harus ditransformasi menjadi skala interval dengan Metode Suksesive Interval. Tujuan dilakukannya transformasi data adalah untuk menaikkan data dari skala pengukuran ordinal menjadi skala dengan pengukuran interval yang biasa digunakan bagi kepentingan analisis statistik parametrik. Selain merupakan sesuatu yang umum,

transformasi tersebut juga untuk mengubah data agar memiliki sebaran normal. Hal ini mengandung makna bahwa setelah dilakukan transformasi data dari skala ordinal menjadi interval, penggunaan model dalam suatu penelitian tidak perlu melakukan uji normalitas. Hal yang menjadi persyaratan dalam penggunaan statistik parametrik, selain data harus memiliki skala interval atau rasio, data juga harus memiliki distribusi atau sebaran normal. Dengan melakukan transformasi data, diharapkan data ordinal sudah menjadi data interval serta telah memiliki sebaran normal yang langsung bisa dilakukan analisis dengan statistik parametrik.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel terikat ( $Y$ ). Analisis ini untuk melihat arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif. Data yang digunakan pada umumnya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_{18}X_{18}$$

Keterangan:

Y = variabel terikat (nilai yang diprediksikan)

$X_1 \dots X_{18}$  = variabel bebas

a = konstanta (nilai Y' apabila  $X_1, X_2 \dots X_{18} = 0$ )

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

agar variabel terikatnya ( $Y$ ) berupa jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri mendekati distribusi normal, maka pada model persamaan di atas, dilakukan transformasi logaritma sehingga persamaannya menjadi :

$$\text{Log } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_{18}X_{18}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kunci kehadiran negara dalam melindungi pekerja migran, harus dimulai dari ujung tombak pemerintahan yaitu desa. Desa merupakan sumber tempat tinggal warga yang ingin bermigrasi. Dengan adanya perlindungan di sumbernya, diharapkan dapat mengurangi risiko yang sampai kini masih sering dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Desmigratif merupakan desa yang memberikan

perlindungan kepada warganya yang menjadi pekerja migran dengan menyediakan layanan terpadu bagi mereka yang akan berangkat, sampai pada mereka yang sudah menjadi TKI purna. Pembangunan desa, menjadi penentu bagi keberhasilan pembangunan daerah dan nasional karena desa memiliki sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata serta sumberdaya lainnya.

Pembangunan di Indonesia kurang berarti bila tidak dilakukan di desa karena masih cukup banyak desa yang belum dikembangkan secara optimal. Bila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 1 Ayat 8, menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, dalam Pasal 78 Ayat 1 dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Walaupun kebijakan pusat untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran telah ada programnya, namun dalam pelaksanaannya di daerah, masih belum banyak didukung oleh kebijakan lokal yang dapat dijadikan pijakan bagi program dan kegiatan yang bersifat lokal. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah diperlukan, khususnya dalam membuat program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, memberikan layanan informasi serta memberikan perlindungan sosial kepada pekerja migran dan keluarga yang ditinggalkan. Desa semestinya menjadi tempat tinggal dan sekaligus menjadi tempat penghidupan yang membuat warganya betah, aman, nyaman serta menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kemiskinan telah menjadi salah satu faktor yang dominan menjadi pendorong bagi warga desa untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKI dalam meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. Motif menjadi pekerja migran yaitu mencari pekerjaan

dengan penghasilan yang lebih besar dalam upaya mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan menabung untuk modal usaha di desa dengan target waktu bekerja selama beberapa tahun. Bagi masyarakat desa, ukuran sukses menjadi pekerja migran adalah jika dapat menabung dan membeli lahan, sawah, ladang, membangun rumah serta modal untuk berwirausaha. Mereka yang tidak sukses di

negara lain sebagai pekerja migran, tetap menjalani kegiatan sebagai petani atau usaha informal lainnya. Harapan TKI purna adalah mendapatkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi, serta pemberdayaan dilakukan secara berkesinambungan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan di desa.

**Tabel 1. Ringkasan Model**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 <sup>a</sup>	.404	.267	.48899

a. Predictors: (Constant), x18, x11, x4, x6, x8, x1, x12, x3, x15, x10, x7, x17, x13, x2, x9, x14, x5, x16

Ringkasan model pada Tabel 1 menjelaskan besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruhnya disimbolkan dengan R (korelasi). Seperti yang terlihat dalam Tabel 1, nilai pada kolom R sebesar 0,636 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas berupa ketersediaan listrik (X<sub>1</sub>); ketersediaan telepon/*handphone* (X<sub>2</sub>); ketersediaan internet (X<sub>3</sub>); ketersediaan ruang layanan informasi bagi TKI (X<sub>4</sub>); ketersediaan rumah desmigratif (X<sub>5</sub>); keberadaan koperasi (X<sub>6</sub>); keberadaan Badan Usaha Milik Desa (X<sub>7</sub>); penduduk desa penerima kredit (X<sub>8</sub>); banyaknya aparatur desa yang lulus di atas SLTA (X<sub>9</sub>); banyaknya penduduk desa yang lulus di atas SLTA (X<sub>10</sub>); banyaknya penduduk desa yang tidak

bersekolah (X<sub>11</sub>); banyaknya penduduk desa yang bersekolah (X<sub>12</sub>); banyaknya jenis sarana ekonomi yang ada di desa (X<sub>13</sub>); banyaknya penduduk desa yang berusia 0–14 tahun (X<sub>14</sub>); banyaknya penduduk usia produktif (X<sub>15</sub>); banyaknya penduduk usia kerja (X<sub>16</sub>); tingkat pengangguran (X<sub>17</sub>); variabel kewilayahan (X<sub>18</sub>) adalah sebesar 63,6% (0,636 x 100%). Namun nilai tersebut masih terkontaminasi oleh berbagai nilai pengganggu yang mungkin menyebabkan kesalahan pengukuran, sehingga SPSS memberi alternatif nilai R Square sebagai perbandingan akurasi pengaruhnya. Nilai R Square pada Tabel 1 sebesar 0,404 atau sebesar 40,4 persen sumbangan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

**Tabel 2. ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.655	18	.703	2.940	.001 <sup>b</sup>
	Residual	18.650	78	.239		
	Total	31.305	96			

a. Dependent Variable: logtki

b. Predictors: (Constant), x18, x11, x4, x6, x8, x1, x12, x3, x15, x10, x7, x17, x13, x2, x9, x14, x5, x16

Tabel 2 memperlihatkan informasi mengenai berpengaruh tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (simultan). Untuk mengambil keputusan tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai Sig. (Signifikansi). Pada Tabel ANOVA nilai Sig. tertera sebesar 0.001 maka dengan mudah dapat disimpulkan bahwa variabel bebas

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hal ini dengan mengikuti taraf Sig. 0,05 sebagai nilai *cut off* dari nilai signifikansi. Nilai tersebut mengandung makna jika nilai probabilitas (Signifikansi) dibawah 0.05 maka seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan begitupun sebaliknya.

Tabel 3. Koefisien Regresi<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.669	.361		4.627	.000
	x1	-.067	.145	-.046	-.464	.644
	x2	-.176	.116	-.154	-1.527	.131
	x3	.064	.111	.056	.579	.564
	x4	.177	.280	.081	.634	.528
	x5	.130	.177	.085	.737	.463
	x6	-.262	.108	-.229	-2.438	.017
	x7	.074	.113	.063	.653	.516
	x8	-.020	.142	-.014	-.143	.886
	x9	-.065	.054	-.122	-1.197	.235
	x10	-.025	.049	-.051	-.518	.606
	x11	.033	.051	.067	.650	.517
	x12	.048	.052	.090	.921	.360
	x13	.083	.028	.288	2.934	.004
	x14	-.073	.055	-.135	-1.333	.186
	x15	.175	.064	.294	2.740	.008
	x16	-.060	.092	-.080	-.650	.518
	x17	.029	.052	.056	.556	.580
	x18	.349	.116	.298	2.995	.004

a. Dependent Variable: logtki

Tabel 3 menyajikan informasi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa variabel  $X_6$  (keberadaan koperasi), variabel  $X_{13}$  (banyaknya jenis sarana ekonomi yang ada di desa), variabel  $X_{15}$  (banyaknya penduduk usia produktif) dan variabel  $X_{18}$  (kewilayahan, jawa dan luar jawa) berpengaruh nyata (signifikan), karena nilainya lebih kecil dari 0.05. Pada sisi lain, variabel bebas  $X_1$  (ketersediaan listrik),  $X_2$  (ketersediaan telepon/handphone),  $X_3$  (ketersediaan internet),  $X_4$  (ketersediaan ruang layanan informasi bagi TKI),  $X_5$  (ketersediaan rumah desmigratif),  $X_7$  (keberadaan Badan Usaha Milik Desa),  $X_8$  (penduduk desa penerima kredit),  $X_9$  (banyaknya aparatur desa yang lulus di atas SLTA),  $X_{10}$  (banyaknya penduduk desa yang lulus di atas SLTA),  $X_{11}$  (banyaknya penduduk desa yang tidak bersekolah),  $X_{12}$  (banyaknya penduduk desa yang bersekolah),  $X_{14}$  (banyaknya penduduk desa yang berusia 0–14 tahun),  $X_{16}$  (banyaknya penduduk usia kerja) dan  $X_{17}$  (tingkat pengangguran) tidak berpengaruh nyata.

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa keberadaan koperasi ( $X_6$ ) berpengaruh negatif terhadap jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Migran

Produktif yang telah memiliki Badan Hukum Koperasi, peluang jumlah penduduknya bekerja ke luar negeri lebih kecil bila dibandingkan dengan Desa Migran Produktif yang tidak memiliki koperasi. Koperasi di Desa Migran Produktif, selayaknya dikelola seperti lembaga bisnis. Dalam sebuah lembaga bisnis, diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan sebutan manajemen. Manajemen dalam badan usaha koperasi harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Manajemen koperasi pada umumnya melibatkan empat unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Seorang manajer harus mampu menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan koperasi merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan.

Secara mikro, koperasi dapat dilihat sebagai unit usaha sedangkan secara makro, koperasi sebagai sistem ekonomi. Dalam dimensi mikro, menurut Asril dan Azmansyah (2013), koperasi memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam dimensi makro, koperasi merupakan faham atau ideologi yang harus menjadi panutan bagi pelaku ekonomi nasional. Koperasi di Indonesia telah mendapatkan legitimasi formal dalam produk perundang-

undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, terutama pasal 33 beserta penjelasannya.

Prinsip ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem perekonomian untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dengan prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan juga menginginkan terciptanya kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan tersebut, seluruhnya terkandung dalam Koperasi. Dalam kaitannya dengan ekonomi kerakyatan, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip ekonomi kerakyatan tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berazaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peranan dalam ekonomi kerakyatan karena koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan.

Peranan koperasi dalam ekonomi kerakyatan, dapat dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci mengenai pengertian koperasi di Indonesia (Asril dan Azmansyah, 2013). Pengertiannya yaitu: (a) Koperasi didirikan berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya. Kebutuhan yang sama ini kemudian diusahakan pemenuhannya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adanya perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan; (b) Koperasi didirikan berdasarkan kesadaran mengenai keterbatasan akan kemampuan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar lagi. Usaha tersebut dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan.

Melalui data pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa banyaknya jenis sarana ekonomi yang ada di desa ( $X_{13}$ ) berpengaruh positif terhadap jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan sarana ekonomi dengan berbagai fasilitas yang ada, masih belum

mampu menarik minat masyarakat untuk tidak bekerja sebagai TKI ke luar negeri. Beberapa alasan mengapa banyak penduduk Indonesia berminat untuk menjadi TKI antara lain disebabkan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Desa Migran Produktif, adanya dorongan dari teman terdekat yang biasanya terjadi pada TKI remaja serta keterbatasan modal untuk membuka usaha sendiri. Dengan bekerja menjadi TKI, mereka beranggapan akan mendapatkan gaji yang cukup besar yang dapat dikumpulkan untuk menjadi modal usaha di dalam negeri.

Masyarakat desa membutuhkan sarana untuk mendukung ekonomi desa agar dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Perkembangan ekonomi desa dapat memberikan peluang berusaha bagi masyarakat desa dan menekan jumlah masyarakat miskin di desa. Beberapa jenis sarana ekonomi yang ada di Desa Migran Produktif antara lain industri mikro, pabrik, pertokoan, pasar permanen, pasar semi permanen, pasar tanpa bangunan, restoran, warung makan/minum, obyek wisata, toko kelontong serta hotel/penginapan.

Keberadaan industri mikro dan pabrik, memegang peranan penting untuk berkontribusi dalam pengembangan wilayah desa. Pada satu sisi, keberadaan serta banyaknya industri mikro dan pabrik, sangat bermanfaat dalam menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan hasil produksi. Pada sisi lain, tempat-tempat perbelanjaan merupakan hal penting lainnya dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi desa. Tempat perbelanjaan berperan sebagai tempat dilakukannya aktivitas ekonomi seperti transaksi ekonomi, kegiatan konsumsi, dan lain sebagainya. Kelompok pertokoan, pasar, dan toko/warung kelontong adalah tiga tempat perbelanjaan dasar bagi masyarakat desa.

Selanjutnya, melalui data pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa banyaknya penduduk usia produktif ( $X_{15}$ ) berpengaruh positif terhadap jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri. Desa yang memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang besar, dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembangunan. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi desa untuk mengejar

ketertinggalannya pembangunan. Hal ini akan dapat terwujud apabila pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam terlaksana dengan baik, terjadi perimbangan antara tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Namun masalah mulai akan muncul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada di desa. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung tenaga kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang akan membawa dampak negatif. Oleh karena itu, wajar apabila desa yang memiliki sumber daya manusianya dengan usia produktif untuk mencari kerja ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik sebagai TKI.

Menurut Sirait dan Marhaeni (2013), pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran yang tinggi membawa dampak buruk bagi perekonomian, individu dan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dapat dicapai. Pengangguran membawa masalah bagi setiap negara. Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang, senantiasa menghadapi masalah pengangguran. Perbedaannya di negara berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan di negara maju mereka mampu memberikan jaminan tersebut.

Berbagai cara dalam mengatasi permasalahan pengangguran sudah ditempuh oleh pemerintah namun masalah tersebut belum mampu untuk diselesaikan. Masalah pengangguran sangat penting untuk diperhatikan karena pengangguran memiliki potensi menimbulkan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran merupakan suatu pemborosan. Selain untuk mengurangi pengangguran, menjadi TKI ke luar negeri merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan bagi sebagian besar warga desa, baik yang belum berkeluarga maupun yang

sudah berkeluarga. Sebagian diantara mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu yang ingin mengubah nasib keluarganya. Adanya keinginan untuk memutus rantai kemiskinan secara pintas serta keinginan untuk meningkatkan taraf kehidupan rumah tangganya membuat para tenaga kerja di desa semakin tertarik menjadi TKI ke luar negeri.

Variabel berikutnya yang dapat mempengaruhi banyaknya TKI bekerja ke luar negeri adalah variabel kewilayahan ( $X_{18}$ ). Dalam penelitian ini, variabel kewilayahan merupakan variabel *dummy* dengan membedakan antara wilayah jawa dan luar jawa. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa wilayah jawa memberikan pengaruh positif terhadap banyaknya TKI bekerja ke luar negeri bila dibandingkan dengan wilayah luar jawa. Dinamika spasial pembangunan di Indonesia masih memperlihatkan ketidakseimbangan antara Jawa dan luar jawa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, secara nasional masih belum mampu mengatasi sepenuhnya permasalahan kesenjangan antar daerah (Bhinadi, 2003). Disparitas pertumbuhan regional menjadi penyebab kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi diperlukan guna meningkatkan kekayaan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tujuan dari pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi, selain meningkatkan kekayaan suatu wilayah juga berpotensi untuk menurunkan kemiskinan dan mengatasi permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Menurut Bhinadi (2003), pemerataan yang paling penting dilakukan adalah pemerataan modal, diikuti pemerataan kualitas sumber daya manusia di jawa dengan luar jawa. Penyebab ketimpangan antara jawa dan luar jawa terjadi karena perbedaan dalam hal pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia. Pemerataan modal fisik mutlak perlu dilakukan agar tidak terjadi bias pembangunan pada daerah-daerah tertentu yang akan mengakibatkan ketimpangan antar wilayah semakin tinggi. Akumulasi modal fisik lebih banyak di wilayah jawa sehingga untuk mendorong pertumbuhan wilayah luar jawa, akumulasi modal fisik juga perlu diarahkan ke luar Jawa.

Pemerintah masih belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif, sehingga walaupun pembangunan di wilayah Jawa lebih pesat dibandingkan luar Jawa, namun penduduk desa di wilayah Jawa memiliki kecenderungan lebih banyak memilih bekerja ke luar negeri. Hal ini diperlihatkan dari Tabel 3 bahwa wilayah Jawa memberikan pengaruh positif terhadap banyaknya TKI bekerja ke luar negeri bila dibandingkan dengan wilayah luar Jawa. Para pencari kerja dan keluarganya berharap dengan bekerja ke luar negeri sebagai TKI, akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka. Sikap tersebut merupakan konsekuensi logis. Bekerja ke luar negeri merupakan pilihan bagi penduduk desa ketika lapangan pekerjaan di dalam negeri tidak cukup tersedia.

Minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah pencari kerja yang berminat dan mendaftarkan diri untuk bekerja ke luar negeri semakin banyak, bahkan ketika dikeluarkan kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI). Permasalahan TKI saat ini memang sangat kompleks sehingga perlu adanya solusi. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dari semua *stakeholder* baik dari pihak pemerintah maupun swasta di tingkat pusat dan daerah.

Bila diperhatikan lebih jauh, kondisi ekonomi memang menjadi alasan utama yang mendorong seseorang bekerja ke luar negeri. TKI bekerja ke luar negeri dengan tujuan utama yaitu untuk mencari modal, membuat rumah, biaya pendidikan anak atau biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal yang menjadi tujuan pokoknya adalah untuk mengubah taraf hidup menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Memang harus diakui bahwa TKI memiliki peran strategis bagi bangsa Indonesia, karena secara nyata mereka memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Keberadaan TKI menyumbang terhadap pendapatan negara dari pungutan pajak, remitansi dan beberapa bentuk sumbangsih lainnya.

Migrasi tenaga kerja dipandang sebagai proses yang tidak terpisahkan dari pembangunan, dengan menjadikan migrasi tersebut potensi positif dalam mendorong pembangunan. Migrasi tenaga kerja yang pada

awalnya dipandang sebagai tanda kegagalan atau kemunduran suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya terhadap pasar kerja, kemudian dipercaya menjadi salah satu usaha pembangunan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan upah yang relatif rendah di tempat asal, mendorong penduduk untuk mencari penghasilan ke negara maju meskipun tanpa bekal keahlian, persiapan, dokumen yang memadai. Sebagian besar TKI bekerja ke luar negeri, umumnya terdorong oleh upah yang relatif tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal. Faktor pendorong dan penarik ini sebenarnya merupakan hukum ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan.

Indonesia menghasilkan angkatan kerja yang melimpah tiap tahunnya. Menurut Bank Dunia, selama periode 2013–2020, jumlah penduduk dengan usia kerja akan naik sebesar 14,8 juta sehingga mencapai 189 juta orang. Pada saat ini, sekitar 50 persen penduduk berusia di bawah 30 tahun. Untuk menciptakan lapangan kerja bagi tambahan angkatan kerja tersebut, perlu dilakukan percepatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode 2013–2020 sebesar 6,5%, maka lapangan kerja yang tercipta sekitar 12,4 juta. Sementara jika tumbuh hanya rata-rata 5% pertahun, maka tercipta lapangan kerja sebanyak 10,2 juta. Hal ini menunjukkan ada 2,2 juta lapangan kerja baru apabila pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dari 5% menjadi 6,5% dalam periode 8 tahun mendatang.

Analisis tersebut menunjukkan masih cukup besarnya kemungkinan peningkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja ke luar negeri dalam beberapa tahun ke depan apabila pertumbuhan ekonomi berjalan lambat sebagaimana telah berlangsung selama beberapa tahun ini. Dengan melihat struktur tenaga kerja yang masih banyak didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SD dan SMP, maka penempatan TKI yang kini sebagian bekerja di sektor rumah tangga mungkin akan tetap terus berlangsung dalam jangka menengah mendatang. Permasalahan TKI seperti penempatan yang ilegal, masa kerja yang lewat kontrak, dan pemulangan paksa

oleh negara penerima mungkin masih akan menjadi agenda kerja pemerintah mendatang.

Perkembangan zaman serta tingginya kebutuhan hidup di desa, mengakibatkan banyak generasi muda berbondong-bondong bekerja ke luar negeri untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah berusaha menciptakan peluang kerja baru di berbagai bidang, tetapi tetap saja peluang tersebut belum dapat menampung melimpahnya pencari kerja yang dari waktu ke waktu terus bertambah. Program Desa Migran Produktif, merupakan terobosan dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, calon TKI, keluarga TKI pada desa yang menjadi kantong TKI. Kunci keberhasilan Program Desmigratif terletak pada keberhasilan pimpinan desa, baik formal maupun informal, dalam menggerakkan inisiatif masyarakat desa, baik secara mandiri maupun dengan didukung oleh kementerian/lembaga/BUMN/BUMD/Asosiasi Pengusaha/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat dan institusi lainnya. Dengan demikian, tidak dapat diabaikan tentang pentingnya fasilitasi penyiapan mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mendukung Program Desmigratif tersebut.

## KESIMPULAN

Program Desa Migran Produktif pada dasarnya merupakan penanganan desa yang menjadi kantong TKI secara terpadu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Program ini membutuhkan keterlibatan pemangku desa masing-masing. Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada calon TKI, TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis mengenai karakteristik desa dan uji hipotesis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa :

1. Keberadaan koperasi ( $X_6$ ) di desa kantong TKI berpengaruh negatif terhadap banyaknya TKI yang bekerja ke luar negeri. Dengan adanya koperasi di desa migran produktif, memiliki kecenderungan

penurunan terhadap TKI untuk bekerja ke luar negeri.

2. Banyaknya jenis sarana ekonomi yang ada di desa migran produktif ( $X_{13}$ ), berpengaruh positif terhadap TKI untuk bekerja ke luar negeri. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pembangunan sarana ekonomi dengan berbagai fasilitas yang ada, masih belum mampu menarik minat masyarakat untuk tidak bekerja sebagai TKI ke luar negeri.
3. Banyaknya penduduk usia produktif ( $X_{15}$ ), berpengaruh positif terhadap banyaknya TKI bekerja ke luar negeri. Semakin banyak penduduk usia produktif di desa migran produktif, akan semakin banyak TKI bekerja ke luar negeri.
4. Variabel wilayah ( $X_{18}$ ), berpengaruh positif terhadap banyaknya TKI bekerja ke luar negeri. Desa di Wilayah Jawa memiliki kecenderungan lebih banyak penduduknya yang bekerja sebagai TKI ke luar negeri.

Desmigratif perlu dikembangkan untuk memberikan pelayanan informasi agar tidak terjadi TKI ilegal. Selain itu, koperasi, sarana dan prasarana desa juga perlu dikembangkan untuk mengaktifkan perekonomian desa. Pemahaman terhadap potensi desa serta kemampuan untuk mentransformasikan sumberdaya yang ada demi kemajuan dan kesejahteraan penduduk, perlu ditingkatkan sehingga pembangunan di desa migran produktif dapat berjalan efektif. Pemerintah desa harus memiliki keseriusan dalam membuat kebijakan pembangunan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat betah tinggal di desa, mendapat pekerjaan atau usaha ekonomi, memiliki pendapatan dan sejahtera, sehingga tidak meninggalkan desanya untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKI.

Selain melibatkan delapan kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, Program Desa Migran Produktif juga perlu melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak

swasta, perguruan tinggi, mitra lokal, perbankan, dan lembaga swadaya masyarakat. Semua *stakeholder* dalam program ini perlu bekerjasama dalam melakukan identifikasi masalah, pemetaan potensi sumber daya alam, manusia, budaya, dan ekonomi desa untuk dijadikan modal bagi pembangunan desa migran produktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

Asril dan Azmansyah. 2013. Strategi Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol.20, No.1, hal. 105-132.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Desa 2014 “Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa”. Bappenas dan BPS. Jakarta.

Bhinadi, A. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dengan Luar Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.8, No.1, hal. 39-48.

Haeruman. 1997. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Latifah, W. dan E.R. Rahadjeng. 2016. Analisis Sumber Daya Pada Daerah Pengiriman TKI di Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Massey, D.S., J. Arango, G. Hugo, A.Kouaouci. 1993. Theories of International Migration. Population and Development Review. Vol.19, No.3, pp 431-466.

Pasaribu, V.A.R. 2007. Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Universitas HKBP Nommensen. Medan.

Sirait, N. dan A.Marhaeni. 2013. Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.2, No.2, hal.108-118.

Stark, O dan D.E. Bloom. 1985. *The New Economics of Labor Migration*. American Economic Review. Vol.75, No.2, pp 173-178.